

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, Informasi yang dikecualikan, pelayanan aduan, advokasi, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,


HARDA KISWAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 10 / Kep.Sekda / 2022

TANGGAL : 10 Oktober 2022

TIM PERTIMBANGAN, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA, DAN
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PERTIMBANGAN	
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5.	Inspektur Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
B.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
C.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	
1.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
3.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
7.	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
8.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9.	Sekretaris Dinas Sosial	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

1	2	3
10.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
11.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
12.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
13.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
14.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
15.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
16.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
17.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
18.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
19.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
20.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
21.	Sekretaris Dinas Kebudayaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
22.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
23.	Sekretaris Dinas Pariwisata	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
24.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
25.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
26.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
27.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
28.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
29.	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
30.	Panewu Anom Kapanewon Gamping	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

1	2	3
31.	Panewu Anom Kapanewon Sleman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
32.	Panewu Anom Kapanewon Mlati	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
33.	Panewu Anom Kapanewon Ngaglik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
34.	Panewu Anom Kapanewon Pakem	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
35.	Panewu Anom Kapanewon Tempel	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
36.	Panewu Anom Kapanewon Ngemplak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
37.	Panewu Anom Kapanewon Seyegan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
38.	Panewu Anom Kapanewon Godean	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
39.	Panewu Anom Kapanewon Moyudan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
40.	Panewu Anom Kapanewon Minggir	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
41.	Panewu Anom Kapanewon Turi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
42.	Panewu Anom Kapanewon Cangkringan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
43.	Panewu Anom Kapanewon Depok	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
44.	Panewu Anom Kapanewon Kalasan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
45.	Panewu Anom Kapanewon Prambanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
46.	Panewu Anom Kapanewon Berbah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
D.	SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Sekretariat
2.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan selaku Sub-Koordinator	Anggota

1	2	3
	Kelompok Substansi Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,


HARDA KISWAYA